



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 027/SN/V-XIII.27/04/2017
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Undangan Seminar Nasional Dua Hari**

Jakarta, 27 April 2017

Kepada Yth,-

[REDACTED]

Rumah sakit pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti halnya instansi-instansi lainnya dibawah pemerintah, maka pengelolaannya dianggap sebagai kantor. Demikian juga halnya dengan anggaran, rumah sakit pemerintah pusat dan daerah harus membuat anggaran setahun sebelumnya untuk mendapatkan anggaran belanja setahun kedepan. Setiap anggaran yang turun rumah sakit daerah sudah diatur pemakaiannya secara detail dalam jenis anggaran yang dikeluarkan, penggunaan anggaran untuk jenis kegiatan yang berbeda adalah dilarang dan bila memang perlu perubahan, harus menunggu mekanisme perubahan anggaran di tengah tahun anggaran yang berjalan. Sehingga dari gambaran pengelolaan keuangan rumah sakit pemerintah sangat kaku dan terikat dengan perencanaan penggunaan anggaran tahun berjalan, tidak ada fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Akibat yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, hal ini diperburuk dengan tidak akurat atau kurang baiknya penyusunan rencana anggaran.

Sehingga tak jarang terjadi bahwa perencanaan terkadang menyulitkan pelaksanaan. Sebagai lembaga layanan publik pemberi jasa dan layanan yang sangat penting, rumah sakit perlu melakukan perubahan paradigma lembaga dari bersifat sosial birokratik menjadi sosial ekonomi yang harus menerapkan konsep-konsep manajemen modern dengan tetap mempertahankan misi dan fungsi sosial rumah sakit. Dalam rangka menghadapi era globalisasi umumnya dan era masyarakat ekonomi asean (MEA) dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit harus melaksanakan dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dengan hal tersebut diatas menjalin komunikasi secara efektif dengan manajemen Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan dan produk BPK lainnya. BPK RI mengambil inisiatif melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK / Direktorat Litbang BPK bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan Seminar Nasional dua hari untuk berupaya membangun komunikasi secara efektif kepada manajemen Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Tema Seminar

Dalam seminar nasional dua hari ini mengambil tema **“Tata Kelola Keuangan Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sesuai Konstitusi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik”** yang dapat ditinjau dari berbagai bidang : Kesehatan, Keuangan, Sosial, Hukum/Perundang-Undangan dan Pemerintahan.

C. Pembicara/moderator..



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

C. Pembicara / Moderator

1. *Keynote Speaker* Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak, MM, CPA, CA, Ketua BPK RI.
2. Tjahjo Kumolo, SH, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek SpM (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia..
4. Dede Yusuf ME, ST, M.Si, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
5. Drs. H. Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
6. Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Ph.D, Ketua OMBUDSMAN
7. Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Deputy Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.
8. Askolani, SE, MA. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Dr. Ir. Raden Harry Hikmat, M.Si, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
10. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, Pengamat Hukum Tata Negara.
11. Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, Universitas Indonesia Bidang Hukum Ekonomi dan Keuangan.
12. Prof. Dr. Arief Djanin, Guru Besar Universitas Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan.
13. *Moderator*, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, Pengamat LIPI.
14. Pemberian Piagam / Sertifikat pihak Pusdiklat BPK RI / LIPI.

D. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu – Kamis, 17 – 18 Mei, 2017
Jam : 08.00 - 13.25 / 08.00 –14.35 WIB (Selesai)
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220
Rundown acara dan jadwal kegiatan tersedia di tempat registrasi peserta.
Dress code hari pertama batik, hari kedua bebas.

E. Peserta dan Biaya

Biaya 1 (satu) peserta Seminar Nasional dua hari adalah **Rp7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Sudah termasuk biaya dokumentasi kegiatan, akomodasi, hotel Grand Sahid Jaya untuk menginap peserta dan transportasi di tempat selama dua hari.
Pelaksanaan kegiatan acara seminar nasional dua hari dana biaya kontribusi peserta di audit Lembaga independent Waterhouse Coopers.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Sekretariat Panitia Seminar Nasional BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q DIREKTORAT LITBANG Lantai 2 Gedung Arsip Jl. Jend. Gatot Subroto No.31 Jakarta 10210 Telp. 021 5738150 Ext. 104 - 730 Contact Person: Drs. Dwi Saptono, MM (0811195567) dan Drs. Bagaskara Ardiyanto, M.Si (0816649749), Faksimili 021 5737519 Email : direktlitbangbpk.lipi@gmail.com

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**DWI SETIAWAN SUSANTO, SE., M.Si., Ak
NIP 196911261996031001**

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPK RI
2. Yth. Sekretaris Jenderal BPK RI



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAR KONFIRMASI KESEDIAAN MENJADI PESERTA
SEMINAR NASIONAL KERJASAMA PUSDIKLAT BPK RI - LIPI**

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta Seminar Nasional dua hari kerjasama Pusdiklat BPK RI - LIPI.

.....2017

Peserta,

.....

NB:
Pembayaran biaya peserta seminar nasional melalui transfer ke rekening **Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rekening: 0377-01-004205-53-8 Atas Nama Rendy Hendrawan SE, Kantor Cabang Kebon Jeruk, Jakarta, Bendahara Panitia Pusdiklat BPK RI - LIPI.** Panitia pelaksana tidak diperkenankan menerima dana biaya kontribusi di tempat registrasi peserta (Non-Tunai). Batas waktu pendaftaran nama peserta H-3 hari kerja sebelum pelaksanaan sudah disertifikasi (Tanda bukti transfer biaya kontribusi peserta dapat dikirim melalui fax / email) Invoice / kwitansi asli diserahkan bendahara panitia di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Panitia Seminar Nasional **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-C.Q**
DIREKTORAT LITBANG Lantai 2 Gedung Arsip
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738150
Faksimili (021) 5737519, Email: direktlitbangbpk.lipi@gmail.com
Drs. Dwi Saptono, MM (0811195567)
Drs. Bagaskara Ardiyanto, M.Si (0816649749)





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

KWITANSI

RECEIPT

No. : 027/S/X.7/27/2017

Number

Sudah Terima Dari : RSP. [REDACTED]

Received From

Banyaknya Uang :

Amount Received

Untuk Pembayaran : () Peserta Seminar Nasional Dua Hari dengan biaya 1 (satu) peserta

In Payment Of adalah **Rp7.500.000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan**

Tema "Tata Kelola Keuangan Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Sesuai Konstitusi Untuk Meningkatkan Mutu

Pelayanan Publik".

Rp. [REDACTED]

Jakarta, 27 April 2017

Catatan :

1. Pembayaran biaya peserta ditransfer ke rekening :

BRI Cabang Kebon Jeruk, Jakarta

A/C 0377-01-004205-53-8

a.n. Rendy Hendrawan, SE

2. Pembayaran dianggap sah setelah cek giro telah dicairkan


Dra. Sarinah Dewi, MM
Kepala Bagian Keuangan